



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 939/III/XII/2016

**Komisi V DPR RI Setujui Draf RUU
Jaskon Dibawa ke Paripurna**

**PMN Untuk PT SMI
Perlu Diaudit BPK**

**Pemerintah Harus Segera
Keluarkan PP Terkait DLP**

**BURT DPR RI Sosialisasikan
Renstra DPR RI ke Sumut**

GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Komisi V DPR RI Setujui Draf RUU Jaskon Dibawa ke Paripurna

Ketua Panja RUU tentang Jasa Konstruksi Muhidin Mohamad Said menyampaikan laporan hasil kerjanya, untuk dimintakan persetujuan dalam pembicaraan tingkat I dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR.

Usai mendengarkan laporan hasil kerja Panja RUU Jasa Konstruksi, seluruh perwakilan Fraksi di Komisi V DPR RI menyatakan setuju terhadap draf RUU tersebut, dan akan melanjutkannya pada pembicaraan tingkat II yakni pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang akan datang.

"Setelah melalui berbagai rangkaian pembahasan perumusan dan proses sinkronisasi, Panitia Kerja akhirnya menetapkan draf RUU tentang Jasa Konstruksi yang terdiri dari 14 bab dan 106 pasal," ucap Muhidin saat raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (07/12).

Ia juga menyampaikan mengenai kronologis pembahasan panja yang telah dilakukan, yakni rapat kerja pertama tentang jasa konstruksi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016 yang menyampaikan bahwa draf RUU tentang Jasa Konstruksi terdiri dari 15 bab dan 113 pasal. Rapat panja kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 perihal penyampaian DIM RUU tentang Jasa Konstruksi oleh pemerintah, yang terdiri dari 905 DIM.

"Rapat panja tahap pertama telah dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2016 sampai tanggal 7 September 2016. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan oleh tim perumus hingga tanggal 5 Desember 2016, dimana



Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI menandatangani draf RUU tentang Jasa Konstruksi

telah diselesaikan perumusan draf RUU tentang Jasa Konstruksi menjadi 14 Bab dan 106 pasal," paparnya.

Rapat panja tahap kedua telah selesai dilakukan pada tanggal 7 Desember 2016 dan telah berhasil menyepakati beberapa keputusan yang belum disepakati sebelumnya dalam rapat tim perumus. Seperti masalah kelembagaan, penyempurnaan penyelenggaraan jasa konstruksi dan perjanjian penyediaan.

Secara keseluruhan terdapat pula substansi - substansi penting lainnya, yang berhasil disepakati DPR RI dengan pemerintah, antara lain terkait dengan pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penguatan standar keamanan

keselamatan kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Selain itu, sertifikat kompetensi kerja akreditasi asosiasi dan pemberian lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi, pengaturan tenaga kerja konstruksi, pengaturan tenaga kerja konstruksi asing dan badan usaha jasa konstruksi asing, kegagalan bangunan dan penilaian ahli, upah tenaga kerja konstruksi dan remunerasi.

Ia berharap, langkah yang dilakukan dalam mendorong dunia jasa konstruksi nasional yang kondusif ke level dan kancah yang lebih tinggi, dapat melahirkan *outcome* sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diberkahi Allah SWT. ■

Ketua DPR RI Sampaikan Duka Mendalam atas Musibah Gempa Aceh

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan duka yang mendalam atas musibah gempa bumi di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya, pada pukul 05.30 WIB. Gempa yang berkekuatan 6,4 Skala Richter tentu cukup mengejutkan, hingga menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh keluarga korban yang sampai saat ini terus bertambah.

“ Secara khusus saya menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sanak saudaranya terluka dalam musibah ini. Sekecil dan sebesar apapun duka saat ini, itu adalah duka kami semua, luka sesama anak bangsa, dan duka sesama rakyat Indonesia,” kata Novanto, dalam pernyataannya, Rabu (7/12).

Politisi F-PG itu menambahkan, hal yang patut dan pantas dilakukan saat ini adalah aksi cepat dan tanggap serta nyata, sehingga manfaatnya dirasakan oleh para korban dan seluruh masyarakat yang berada di sekitar wilayah yang terkena musibah.

"Sebagai Ketua DPR RI, saya akan menyuarakan kebulatan tekad seluruh wakil rakyat untuk bersama-sama membantu korban dengan materi, tenaga maupun pikiran," imbuh Novanto.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, masih kata Novanto, sudah pada tempatnya musibah ini mendapatkan prioritas dan perhatian serius, sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengintruksikan penanganan prioritas bagi musibah gempa di Aceh ini.

"Saya juga berharap kepada seluruh stakeholder dan pihak-pihak yang selama ini memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung dalam

penanganan musibah untuk segera bertindak, khususnya mengantisipasi juga kemungkinan gempa susulan," harap Novanto.

Novanto menambahkan, Indonesia memiliki lembaga-lembaga penanganan musibah dan tanggap darurat yang sudah terlatih dan terbiasa dalam melakukan aksi cepat. Ia yakin, lembaga-lembaga itu akan bekerja secara maksimal demi kepentingan kemanusiaan. Sehingga diharapkan akan semakin banyak korban yang bisa diselamatkan.

"Saya juga akan mengkoordinasikan penanganan musibah ini dengan komisi-komisi di DPR RI yang terkait. Agar segala bentuk antisipasi dan bantuan lebih bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran dan tujuan kepada mereka yang membutuhkan," komitmen Novanto.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu berharap tidak ada lagi kejadian yang sama ke depannya. Karena itu, deteksi dini atas berbagai peristiwa yang bisa menimbulkan korban jiwa sangat penting untuk mendapat perhatian.

"Terakhir saya mengajak kepada kita semua untuk menyempatkan waktu dalam setiap ibadah untuk

menyisipkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi para korban yang terluka dan memberi tempat terbaik kepada mereka yang telah meninggal dunia, serta memberikan kekuatan iman dan ikhlas bagi keluarga yang ditinggalkan, agar selalu tabah menghadapi cobaan ini," tutup Novanto. ■



Ketua DPR RI Drs. Setya Novanto, Ak.

(sf). Foto: Andri/br



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murydiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Revisi UU MD3 Bertujuan Memperdetail Aturan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah memaparkan rencana revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD RI, DPRD atau MD3 akan didesain guna menspesifikasi dan memperdetail aturan untuk keempat lembaga negara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesaat setelah menerima kunjungan kehormatan Pelaksana Tugas Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Mr. Brian McFeeters di Ruang Tamu Delegasi Ketua DPR RI Nusantara III, Kamis (8/12) sore.

"Ada banyak isu terkait dengan Undang-undang MD3, yang memang pada akhirnya harus diubah, misalnya lembaga-lembaga perwakilan ini kan besar sekali. Di situ MD3, MPR, DPR, DPD RI, DPRD. Ada empat lembaga besar dalam satu undang-undang. Itu yang menyebabkan undang-undang ini kurang detail. Padahal lembaga-lembaga ini perlu pengaturan yang lebih detail," urai Fahri.

Dia juga menjelaskan, ada kemungkinan undang-undang yang dimaksud akan dipecah menjadi empat atau tiga. "Karena undang-undang



Wakil Ketua bidang Korkesra DPR RI Fahri Hamzah

tentang DPRD itu sudah masuk pada rezim undang-undang pemerintahan daerah. Jadi nanti ada undang-undang DPR, DPD dan undang-undang MPR RI. Supaya dia lebih spesifik dan lebih detail," untkap Fahri.

Dia memaparkan mekanisme revisinya, beragam pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI akan dibawa ke Badan Musyawarah atau Bamus. Setelah itu Bamus akan menjadwalkan pembahasan. Pandangan fraksi akan diajukan melalui mekanisme yang ada di DPR RI.

"Pertemuan-pertemuan informal dan lobi-lobi sedang dilaksanakan, dan kita tunggu saja dinamika yang ada di lapangan. Tentu semuanya akan tetap berdasar pada undang-undang dan tata tertib yang sudah ada saat ini," papar Fahri.

Dia juga mengusulkan secara pribadi bahwa kode etik dan tata tertib dijadikan undang-undang. "Biar pengaturan pada anggota itu levelnya undang-undang, jadi bukan sekedar tata tertib. Saya kira di negara-negara yang level demokrasinya maju juga demikian," ujar Fahri. ■

(dta,mp). Foto: Anhari/br

Diperlukan Pihak Independen Tangani Kasus PT PRIA

Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Syaikhul Islam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA).

Acara tersebut membahas tentang fungsi pengawasan KLHK dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola oleh PT PRIA, pasalnya dampak limbah B3 tersebut diduga merugikan dan mengganggu kesehatan masyarakat di wilayah Mojokerto, Jawa Timur.

"Saat melakukan kunjungan ke Mojokerto, kami melihat beberapa orang dan anak kecil terkena penyakit kulit yang dugaannya disebabkan oleh pencemaran air dari PT PRIA. Maka disini kita ingin meminta audit lingkungan kepada KLHK

beserta jajarannya dan juga keterangan dari PT PRIA supaya menindak lanjuti dugaan pencemaran lingkungan tersebut, sehingga kita dapat mengambil tindakan terkait keresahan masyarakat tersebut," ujar Syaikhul di Ruang Sidang Komisi VII, Kamis (08/12).

Pada kesempatan tersebut Dirjen



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Tuti Hendrawati Mintarsih melaporkan dari dua hasil analisis yang dilakukan oleh KLHK ataupun PT PRIA tidak ditemukan indikasi logam berat pada air tanah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun kedua hasil tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga muncul tuntutan untuk menutup PT PRIA.

"Kami melakukan pengambilan sampel air sumur warga dan air sumur pantau, hasilnya tidak ditemukan parameter logam berat yang melebihi baku mutu. Tak hanya itu, PT PRIA juga melakukan uji yang serupa namun kedua hasil tersebut ditolak oleh masyarakat yang berdemo untuk menutup PT PRIA," jelas Tuti.

Dari hasil rapat tersebut, Komisi VII DPR RI mendesak KLHK beserta

jajarannya agar segera melakukan penanganan terkait kasus tersebut dan meminta untuk melibatkan pihak ketiga yang independen. "Saya berharap agar KLHK dapat bertindak profesional karena kasus tersebut sangat sensitif baik dari sisi sosial, kesehatan, maupun hukum. Salah satu solusinya dengan melibatkan pihak independen yang tidak memiliki kepentingan tertentu," pungkask Syaikhul.■

(contoh) Foto: Kreano/hr

Ketua GOPAC Fadli Zon Dorong Semua Anggota Parlemen Dunia Bersatu Lawan Korupsi

Pada Hari Anti-Korupsi Internasional tanggal 9 Desember ini, GOPAC mendorong semua pihak, khususnya anggota parlemen di seluruh dunia, untuk bersatu melawan korupsi.

Sekaligus berkolaborasi dengan komunitas internasional, badan-badan pemerintah, otoritas independen dan masyarakat sipil untuk mendukung pelaksanaan Agenda 2030 yang inklusif, transparan dan akuntabel.

Demikian pesan Ketua *Global Organization of Parliament Against Corruption* (GOPAC) Fadli Zon dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember. GOPAC juga mendorong semua pihak untuk melawan impunitas dan segala upaya yang dapat melemahkan gerakan antikorupsi.

GOPAC mencatat, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kerangka legislasi.

Bila ini terjadi, maka kepercayaan publik pada parlemen akan semakin menurun, dan melemahkan daya juang dalam memberantas korupsi. Untuk memerangi tunggangan politik tersebut, parlemen harus menjadi gerbang utama untuk meningkatkan rezim anti-korupsi di negara masing-masing.

"Kami yakin, jika parlemen dan anggota parlemen sepenuhnya sadar terhadap Tujuan Pembangunan Global, setiap negara akan memperoleh manfaatnya. Mari, kita ambil bagian dalam memastikan pemenuhan agenda internasional ini, menuju

pembangunan dunia yang berkelanjutan di tahun 2030," tandas Pimpinan DPR RI bidang Korpolkam ini.

the Role of Parliamentarians in Ensuring the Effectiveness of Development Resources in Support of the SDGs Implementation.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon

Lebih lanjut Fadli Zon menegaskan, GOPAC percaya bahwa anggota parlemen adalah agen perubahan yang kuat. Melalui mandat konstistusi yang dimilikinya, anggota parlemen adalah mitra kerja utama untuk memastikan terciptanya kondisi publik untuk pembangunan berkelanjutan yang akuntabel, inklusif, partisipatif dan transparan. Peran penting parlemen diakui dalam deklarasi UN Summit 2015: "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development."

Pada tahun ini, GOPAC telah melaksanakan *Pilot Project: Strengthening*

Melalui program ini, GOPAC telah menyusun buku panduan untuk anggota parlemen yang memberikan penjelasan pendekatan-pendekatan cara kerja yang efektif untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Seperti yang telah dinyatakan dalam *GOPAC's Jakarta Declaration*, bahwa GOPAC menegaskan pentingnya peran anggota parlemen untuk melakukan

pengawasan yang efektif dalam pengajuan pengusulan anggaran, hukum, program kerja dan kebijakan, sebagai bentuk kontribusi anggota parlemen dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

GOPAC berkomitmen untuk memerangi korupsi, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk dalam mendorong pelaksanaan *UN Convention Against Corruption* (UNCAC) untuk memastikan penggunaan sumber daya domestik dalam negeri dan asing yang efektif dan efisien, serta akuntabel.■

(hs), Foto: Kreano/hr

PMN Untuk PT SMI Perlu Diaudit BPK

Hampir setiap tahun, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memperoleh penyertaan modal negara (PMN). Total PMN yang sudah disalurkan sebesar Rp24,3 triliun. Ini perlu diaudit oleh BPK untuk memastikan bahwa PMN tersebut betul-betul untuk membiayai pembangunan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti rapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut PT. SMI, Rabu (7/12). Heri melihat, belum ada

paparan yang jelas dari PT SMI berapa sebetulnya kebutuhan PMN untuk tahun 2017. Ini penting sebagai bentuk pengawasan DPR RI terhadap kinerja keuangan BUMN.

"Kalau kita tidak melihat catatan yang komprehensif, termasuk dengan rencana kerja yang akan dilakukan, tentu ini jadi catatan tersendiri. Saya mengusulkan, agar PMN pada periode ini jadi catatan, supaya tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan. Selama ini, kita juga tidak tahu laporan keuangan komprehensifnya seperti apa. PMN ini benar digunakan untuk membantu proyek atau bayar utang," kilah politisi Partai Gerindra itu.

Heri juga mengimbau, PMN yang disalurkan kepada PT SMI hendaknya tidak digunakan untuk

menutup angsuran yang tertunggak yang diberikan kepada sejumlah debitur. "Kita minta untuk pencairan PMN 2017 dapat ditempatkan dalam rekening terpisah untuk memudahkan pengawasan, betul tidak dana PMN ini digunakan sesuai dengan peruntukannya atau bisnis *plan* yang diajukan," tambah Heri.

Bisnis *plan* khusus untuk PMN kali ini, lanjut politisi dari dapil Jabar IV itu, ternyata campur aduk dengan bisnis *plan* tahun-tahun sebelumnya. BPK perlu melakukan audit dengan tujuan tertentu atas PMN yang sudah dicairkan sebelumnya. "Saya berharap ini jadi catatan penting. Kita ingin PT SMI sebagai alternatif tujuan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik," tutup Heri. ■

(mb)Foto: Aekal/br



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

Revisi UU Sumber Daya Hayati, Komisi IV Himpun Masukan ke Unsrat Manado

Dalam rangka revisi Undang-Undang nomor 50 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Komisi IV DPR RI mengunjungi Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara untuk mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertempat di Aula Universitas Samratulangi Manado, Rabu (7/12).

Ketua Tim Kunspek Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan banyak pertimbangan yang menjadi dasar direvisinya RUU tersebut menjadi lebih relevan, "UU nomor 5 Tahun 1990 ini sudah lebih dari 25 tahun banyak sekali perubahan strategis nasional seperti berubahnya kondisi alam, kondisi penduduk, sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan demokratis, sehingga peran daerah atau adat akan

kita perkuat di RUU tersebut," terangnya.

Secara Umum RUU ini memuat materi-materi pokok yang terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Selain itu materi terkait masyarakat hukum adat, data dan informasi serta aspek perlindungan dan aspek terlibatnya masyarakat adat

menjadi titik berat direvisinya RUU tersebut.

Daniel mengatakan RUU ini harus segera direvisi, "RUU ini menjadi sangat penting karena letak Indonesia yang tropis lalu juga sumber daya hayati dan ekosistem disini sangat besar, dengan kita melindungi sumber daya tersebut berarti sama saja dengan kita melindungi apa yang ada di dunia," tutur pria asal Fraksi PKB tersebut.

Selanjutnya Komisi IV akan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Joban

membentuk Panja dan akan terus meminta masukan dari pakar-pakar berbagai bidang sehingga RUU ini menjadi komprehensif. Selain itu juga akan memanggil kembali mitra kerja dari kementerian terkait.

Dalam acara FGD tersebut hadir pula oleh Rektor Universitas Samratulangi Prof. Dr. Ir. Sangkar Hadi. Sedangkan Tim Kunspek beranggotakan Sudin, Mindo Sianipar, Yadi Srimulyadi, Rahmat Handoyo, Dardiansyah dan Henky Kurniady (F-PDIP), Azhar Romli (F-PG), Susi (F-Gerindra), Nasyid Umar (F-PD), Indra Chunda (F-PAN), Jamaluddin Jafar (F-PAN) dan Sulaeman (F-Nasdem), Fauzi (F-Gerindra). ■

(Giyamp), Foto: Juyadi/hr

Pemerintah Tidak Kompak Soal Moratorium UN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait Moratorium Ujian Nasional (UN). Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini, malah dianulir sendiri oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet, pada Rabu (7/12) malam.

“Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksanaannya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” tegas Fikri, dalam rilis yang diterima Parlemen, Kamis (8/12).

Politisi F-PKS itu menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR RI, adalah hal yang tidak baik. Karena menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.

“Ini tidak baik. Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud baru melakukan komunikasi dengan komisi X DPR RI,” sergah Fikri.

Fikri menjelaskan, Komisi X DPR RI melakukan rapat kerja dengan Mendikbud pada 1 Desember lalu, dengan agenda pembahasan Ujian Nasional. Waktu itu, kata Fikri, Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian Wapres



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih

menyatakan menolak proposal mendikbud itu.

Sebagaimana diketahui, pada raker itu, Mendikbud Muhadjir menyampaikan beberapa alasan perlunya UN dimoratorium. Di antaranya adalah Moratorium UN sesuai dengan Visi Nawa Cita Presiden Jokowi (Pasal 8), Moratorium UN sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2596/2009 tentang Pemerataan Kualitas Pendidikan, menghindari kecurangan laten dari UN, ketidakmampuan UN dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagainya.

Ke depannya, Fikri berharap pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.

“Keputusan yang tidak sesuai dengan proposal pemerintah sendiri, ini rawan memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu. Karena UN ini anggaran di APBN-nya mencapai Rp 500 miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sf), Foto: Krenah/hr

DPRD dan PMI Surabaya Minta RUU Kepalangmerahan Disahkan

RUU Kepalangmerahan tak juga selesai dibahas sejak 2004, untuk itu DPRD dan Palang Merah Indonesia provinsi Surabaya melalui Badan Keahlian Dewan (BKD), meminta DPR RI untuk segera membahas dan mensahkannya menjadi Undang-undang.

Hal tersebut terungkap saat Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Johnson Rajagukguk melakukan audiensi dengan DPRD dan PMI Provinsi Surabaya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

Usai pertemuan, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menjelaskan, saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU tersebut ke DPR RI dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme di DPR RI. "Ada beberapa substansi yang mereka (DPRD dan PMI Surabaya) sampaikan, tentu saja hal itu akan saya sampaikan ke AKD terkait untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson juga menerangkan mengenai rentang waktu yang cukup lama terkait pembahasan RUU tersebut. dikarenakan adanya dinamika yang masih menjadi pembicaraan politik antar fraksi, "Kita berharap saat pembahasan nanti sudah ada keputusan sehingga RUU bisa menjadi UU," harapnya.

RUU Kepalangmerahan, lanjut Johnson, memang suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat dan tentu saja bagi Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah, karena sebagai organisasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan merupakan sesuai Konvensi Jenewa tahun 1949, dimana PMI wajib dilengkapi dengan undang-undang yang memberi arahan, landasan dan kepastian hukum.

"Regulasi ini memang penting untuk menentukan bagaimana nanti dalam menjalankan tugas yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu, sehingga tidak ada masalah. Dalam memberikan layanan yang sifatnya sosial dan kemanusiaan mungkin selama ini tidak ada hambatan, tapi alangkah baiknya secara hukum kalau itu diberikan status dan payung hukum," harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Prov. Surabaya, Agustin Poliana mengatakan pihaknya berharap RUU kepalangmerahan itu dapat segera dibahas,

karena RUU ini sudah sejak 2004 masuk ke DPR RI namun belum juga selesai dibahas.

"Ada aspirasi dari teman-teman Palang Merah Surabaya yang sangat mendesak, yang menghantar kami datang ke BKD untuk menyampaikan aspirasi dan menjawab ketidaktahuan kami terkait m a n d e k n y a R U U Kepalangmerahan ini," tuturnya.

Menurut salah satu perwakilan PMI Surabaya, selama ini, penggunaan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta aktivitas kepalangmerahan PMI didasarkan pada Keppres RIS Nomor 25 Tahun 1950 dan Keppres RI Nomor 246 Tahun 1963 yang menegaskan PMI sebagai organisasi sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

Namun, menurut mereka, hal itu dirasa belum cukup memperkuat dan tentu tidak



Kepala BKD DPR RI Johnson Rajagukguk melakukan audiensi dengan DPRD dan PMI Provinsi Surabaya

sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, maka penggunaan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai lambang pembeda harus segera diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional agar selain aktivitas Kepalangmerahan PMI mendapatkan jaminan secara hukum oleh negara, dimana nantinya peraturan perundang-undangan itu menjadi sumber hukum positif. ■

(rnm), Foto: Rami/br

Komisi IX DPR RI Akan Perjuangkan Nasib Pengusaha Jamu Tradisional

Pemberlakuan regulasi kepengurusan perizinan oleh Kementerian Kesehatan untuk Pengusaha dan Obat Tradisional menuai protes dari Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia, pasalnya regulasi yang dinilai menyulitkan tersebut membuat ratusan industri jamu kecil harus gulung tikar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya akan memperjuangkan nasib para pengusaha jamu tradisional dengan memanggil pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkes.

"Kita akan dudukkan semua *stakeholder* terkait untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, karena jamu adalah produk Indonesia yang harus diperjuangkan, makanya kami mau pemerintah membuat peraturan yang *fleksible*," ungkapnya kepada Parlemenaria baru-baru ini.

Perubahan Persepsi Rupiah Jangan Ubah Ketergantungan pada Negara Lain

Menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin merubah persepsi kurs rupiah terhadap dollar AS yang selama ini menjadi tolak ukur kondisi fundamental ekonomi nasional, diharapkan tidak mengubah pula ketergantungan Indonesia pada negara lain, seperti Cina dan Jepang.

“ Permintaan Jokowi untuk mengubah persepsi ketergantungan rupiah terhadap dollar AS jangan sampai menimbulkan persepsi baru bahwa ekonomi kita sedang diarahkan untuk bergantung ke negara lain, yaitu Cina.” Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilis yang diterima Parlemen, Rabu (7/12).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi berargumen tidak relevannya dollar AS untuk menggambarkan fundamental ekonomi Indonesia, lantaran AS bukan mitra dagang terbesar Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS hanya 10-11 persen dari total ekspor. Untuk itu, kurs rupiah terhadap dollar AS seharusnya tidak mendominasi persepsi perekonomian Indonesia. Sebaliknya, ekspor ke Cina mencapai 15,5 persen dan Jepang 10,7 persen. Jadi, mata uang Yen dan Yuan dinilai paling representatif untuk menggambarkan ekonomi nasional.



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

Heri menanggapi, nilai ekspor Indonesia yang rendah ke AS tidak harus direspon dengan mengubah persepsinya. Perlu diingat, walau ekpornya rendah, tapi tren perdagangan dengan AS selalu menunjukkan surplus. Sebaliknya, dengan Cina justru cenderung defisit. Menurutnya, tidak ada aturan standar

tentang acuan kurs. Ini hanya soal persepsi perdagangan dan nilai tukar.

"Sebenarnya, langkah paling efektif untuk menghindari pengaruh penguatan mata uang asing terhadap rupiah bukan bergantung pada negara luar, namun seberapa kuat dan mandiri ekonomi kita terhadap negara lain. Semakin kita bergantung ke suatu negara, maka naik-turunnya rupiah juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi di negara tersebut," jelas Heri.

Heri menyerukan, yang paling penting dari diskursus ini adalah kemandirian ekonomi nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Tak berpengaruh persepsi ekonomi nasional didasarkan pada kurs rupiah terhadap AS, Cina, atau Jepang. Semuanya, kata Heri, sama saja. Justru persepsi tunggal yang terbentuk adalah ekonomi kita bergantung ke bangsa lain. Ini sebuah paradoks. ■

(mb), Foto: Atsaku/br

Lebih lanjut, politisi F-PPP itu mengungkapkan Komisi IX akan memberikan perhatian yang cukup besar terkait permasalahan yang dialami GP Jamu Indonesia. "Kami tidak menginginkan produk asli Indonesia mati, ini harus diperjuangkan. Jamu tradisional harus tetap eksis di masa yang akan datang sehingga bisa bersaing dengan jamu yang datang dari luar negeri," katanya.

Hal Senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan yang mengatakan banyaknya pengusaha jamu yang mengadu gulung tikar karena adanya regulasi yang memberatkan keberlangsungan mereka.

"Jika ada regulasi yang memberatkan kami akan panggil Kemenkes dan Badan POM untuk mengidentifikasi aturan yang memberatkan (pengusaha jamu)

tersebut. Kita ingin sebagai wakil rakyat mendudukan semua *stakeholder* dan mencari solusi agar jamu tradisional bisa berkembang sesuai arahan Presiden," tuturnya.

Politisi F-Demokrat itu juga mengungkapkan produk jamu tradisional secara turun menurun diyakini memiliki manfaat, maka dari itu kita harus mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi jamu tradisional yang lebih baik untuk kesehatan bukan jamu ilegal yang masuk ke Indonesia. Karena kalau salah mengkonsumsi jamu atau obat (ilegal) dampaknya akan berbahaya.

"Kalau mengkonsumsi jamu yang salah ini akan menjadi masalah untuk Indonesia, mengapa, karena efek dari salah mengkonsumsi jamu (ilegal) baru terlihat 5-10 tahun

setelah mengkonsumsi, misalnya gagal ginjal itu salah satu penyakit yang disebabkan karena salah mengkonsumsi obat," ungkapnya. ■

(rnm) Foto: Jnyadi/br



Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal

Kunci Sukses Pendidikan Adalah Sarana dan Prasarana

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, kunci sukses pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Pentingnya sarana dan prasarana yang layak, dan hasil temuan Komisi X DPR RI di daerah yang memperlihatkan sarana dan prasarana yang tidak memadai, mendorong Komisi X DPR RI membentuk Panja Sarana dan Prasarana.

“ Karena menurut saya pribadi, melihat bagaimana pendidikan ini bermutu, dan suksesnya pendidikan, itu ditentukan oleh sarana dan prasarana. Oleh karenanya, kami terus berupaya, agar Pemerintah dapat memberikan data yang objektif, terhadap sarana dan prasarana pendidikan,” kata Sutan, disela-sela RDP antara Panja Sarana dan Prasarana dengan pakar pendidikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, membuat semua elemen yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan,

mendapatkan suasana yang menyenangkan. Imbasnya, kegiatan belajar sekolah menjadi terganggu.

“Bayangkan ada guru dan siswa, tapi tidak ada tempat belajarnya. Jika sarana dan prasarana tidak layak, guru juga bisa menjadi malas untuk mengajar. Ini harus kita buat standar, bagaimana negara menata sarana dan prasarana. Masih banyak yang belum memiliki sarana dan prasarana yang layak,” kritisi Sutan.

Apalagi jika melihat data, masih kata Sutan, persentase sekolah rusak lebih banyak dibandingkan sekolah layak. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar untuk Pemerintah. Panja Sarana dan Prasarana pun meminta Pemerintah, untuk memberikan data inventarisasi yang akurat, sehingga upaya perbaikan dapat disegerakan. Sutan menambahkan, pihaknya juga akan memanggil sejumlah pimpinan daerah, untuk memberikan data sarana dan prasarana pendidikan di daerahnya.

Sutan menambahkan, sarana dan prasarana tidak boleh dianggap sesuatu yang tidak penting.

Menurutnya, sarana dan prasarana menjadi sesuatu yang penting dalam indikator pendidikan, selain siswa dan guru. Untuk itu, pihaknya

memohon kepada Mendikbud atau pemerintah daerah, untuk mengalokasikan APBN, maupun APBD sesuai dengan Undang-undang, minimal 20 persen dari anggarannya untuk pendidikan

“Kalau mau pendidikan kita mau bermutu, sarana dan prasarana ini harus menjadi skala prioritas bagi dunia pendidikan. Selain Pemerintah, kita juga harus ikut melibatkan masyarakat, pengusaha. Kan ada perusahaan yang memiliki CSR. Ini tugas kita semua untuk mencerdaskan bangsa,” tegas Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu berharap, dengan adanya Panja Sarana dan Prasarana ini menjadi salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Tanah Air.

Sebelumnya, pakar pendidikan Arief Rachman mengatakan, sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan harus disediakan oleh semua pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana pendidikan juga harus memiliki *sustainability*.

“Saya tidak ikhlas, jika Indonesia tidak menjadi negara terbaik di Indonesia. Kita tidak bisa membandingkan dengan Singapura. Kita memang kalah dibanding Tiongkok, tapi kita punya kelebihan, salah satunya demokrasi. Pendidikan merupakan aset bangsa yang luar biasa,” kata Arief. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Plt Sekjen DPR RI Terima Delegasi Setjen Senat Kamboja

Pelaksana tugas Sekjen DPR RI Achmad Djuned menerima kunjungan delegasi Sekretaris Jenderal Senat Kerajaan Kamboja di Gedung Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (08/12).



Plt Sekjen DPR RI Achmad Djuned menerima Kunjungan Delegasi Setjen Senat Kerajaan Kamboja

Menurut Djuned, pertemuan ini merupakan pertemuan yang rutin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Parlemen yang tergabung dalam *Association of Secretaries General of Parliaments* (ASGP).

"Sudah menjadi kebiasaan hubungan antar Sekretaris Jenderal Parlemen Dunia. Kita sering melakukan pendidikan-pendidikan dan tukar pengalaman, baik dilakukan bersama-sama dalam pertemuan grup kerja ASGP maupun secara bilateral, seperti kunjungan kali ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan

Indonesia merupakan negara yang sering dikunjungi untuk bertukar pengalaman, terutama terkait masalah demokrasi dan bentuk pelayanan Sekretariat sebagai unsur pendukung DPR RI.

"Pelayanan Sekretariat Jenderal dan BKD dianggap bagus oleh Sekretariat Jenderal parlemen negara lain, kita sering menjadi tempat belajar," tandasnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif itu, Ing Chenda selaku *Director of General Department for Legal Service and Collective Memory* menanyakan banyak hal, salah satunya terkait fungsi representasi parlemen di konstituen

masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Persidangan Damayanti mengapresiasi kunjungan tersebut. Selanjutnya, ia menjelaskan dalam menjaring aspirasi konstituen, bisa dilakukan melalui kunjungan kerja atau pengaduan masyarakat.

"Secara substansi melalui komisi dan konstituen melalui kunjungan individu. Nantinya, permasalahan daerah dapat disampaikan kepada pemerintah pusat ketika melakukan rapat kerja. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan parlemen Kamboja," ungkap Damayanti. ■

(ann.mp) foto: agra/indoci/foto

Potensi Pariwisata dan Maritim Harus Dikembangkan Serius

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus memiliki fokus untuk menjadi negara maju berbasis maritim dan pariwisata. 13.466 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 KM serta luas lautan 5,8 juta km² merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa yang belum dioptimalkan sepenuhnya oleh negara Indonesia. Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, dalam rilisnya, Rabu (7/12).

Ia menyoroti adanya pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3 triliun. Meski ada pemangkasan, tapi tiap kementerian masih leluasa melaksanakan program strategis apabila fokus kerjanya terarah pada pembangunan yang produktif.

"Negara kita terbentang pada paparan laut yang sangat luas. Desa pesisir saja ada 10.660 desa yang tersebar pada 300 kabupaten. Ini mesti jadi fokus kerja pembangunan nasional yang serius sehingga 2.636.758 rumah tangga nelayan menjadi berdaya kekuatan sumber daya manusia Indonesia akan terdongkrak signifikan pada IPM (Index Pembangunan Manusia) nya," jelas Akmal.

Akmal merujuk pada data BPS 2014 dimana pada asumsi setiap keluarga nelayan sebanyak 4 orang, maka jumlah warga pesisir sebesar 10.547.032 orang atau setara 4,4% jumlah penduduk Indonesia. Fokus pembangunan negara ini kebanyakan meleset akibat tidak sinkronnya potensi alam yang dimiliki dengan jenis kegiatan yang diaplikasikan



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin

dilapangan sehingga terkesan kemajuan negara ini sangat lambat. Padahal, potensi dukungan ekonomi bangsa ini sangat besar namun terbelenggu pada angka kemiskinan yang sangat besar termasuk pada keluarga nelayan.

"Keterbatasan terhadap akses modal, sarana dan prasarana menangkap ikan, membudidaya ikan dan bertambak garam hingga saat ini banyak kita jumpai di lapangan. Keberpihakan negara untuk melindungi profesi masyarakat pesisir

dibutuhkan karena sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa ini," ucap legislator PKS daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu.

Akmal mengatakan, nelayan termasuk pembudidaya ikan dan petambak garam merupakan faktor penggerak utama sektor perikanan dan kelautan. Cuma pemerintah belum menemukan potensi tersebut sebagai hal yang perlu digarap serius, sehingga tampak pada alokasi anggaran KKP merupakan terkecil diantara kementerian yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI.

"Saya di komisi IV DPR RI, kedepannya akan terus mendorong pemerintah, agar dapat memaksimalkan potensi maritim dan pariwisata sekitar pesisir. Potensi laut dan perikanan yang dimiliki Indonesia saat ini sangat ironi, sebab potensi gerak ekonomi masyarakat pesisir yang begitu besar semestinya mampu menunjang perekonomian negara bila dikelola secara maksimal," pungkasnya. ■

(dnp), Foto: Anahit/for

Deputi Persidangan Beri Pengarahan Kedisiplinan Pegawai

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan pengarahan tentang "Sosialisasi Tantangan-Tantangan dalam Pelaksanaan PP 53 Tahun 2015 Tentang Disiplin PNS dan Solusinya, Serta Pengenalan Aplikasi E-Disiplin."

“ Deputi Persidangan Damayanti, mengharapkan dengan acara pengarahan ini dimaksudkan bisa menggugah pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI meningkatkan kedisiplinan.

"Semoga sosialisasi ini dapat *refresh* dan menggugah teman-teman agar lebih disiplin. Ini juga menjadi catatan tingkat kedisiplinan kehadiran, menjadi salah satu acuan ketika akan dipromosikan atau dimutasikan," jelas Damayanti saat acara sosialisasi, di Nusantara II, Jumat (9/12).

Damayanti juga mengatakan, tunjangan kinerja yang telah direalisasikan hendaknya dibarengi dengan tingkat kedisiplinan pegawai. Dia mengungkapkan, catatan yang ada dari 1325 pegawai Setjen DPR RI ternyata ada 370 orang terkena pelanggaran disiplin, khususnya tentang kehadiran. "Khususnya tentang

kehadiran tepat waktu pulang lebih awal, itu yang membuat prihatin kita," ungkapnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 dijelaskan, disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

"Jadi pegawai negeri ketika lebih dari 46 hari akumulasi dia tidak hadir



Deputi persidangan Setjen DPR RI Damayanti

itu dia harus keluar. Ini yang disampaikan. Kita tidak bisa berleha-leha, malas-malas, sudah bukan saatnya. Lebih dari 46 hari keluar. Moga-moga dengan sosialisasi ini teman-teman giat dan memicu untuk lebih rajin lagi," tandas Damayanti. ■

(eko.mp) foto: gty

Pemerintah Harus Segera Keluarkan PP Terkait DLP

Dokter Layanan Primer (DLP) menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Program yang menjadi amanat Undang-undang Pendidikan dan Kedokteran itu dinilai belum jelas maksud dan tujuannya.

Bahkan, ada reaksi yang memperlihatkan resistensi dari implementasi UU itu. Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai, harus ada hal-hal yang diluruskan agar tidak menjadi polemik.

"Kita harus mengetahui secara mendalam apakah DLP berdampak besar terhadap indeks pelayanan kesehatan. Kalau itu menjadi penting, dan memiliki signifikansi yang besar, maka DLP harus didorong. Sehingga harus menjadi program Pemerintah yang harus dibiayai dari negara," kata Dadang,

disela-sela RDP terkait DLP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Politisi F-Hanura itu melihat, selama ini banyak protes dari para dokter, terutama dokter yang sudah membuka praktek. Karena dengan DLP yang sederajat dokter spesialis, maka dokter yang umum sekarang ini tidak berlaku lagi. Pasalnya, jika seseorang ingin membuka praktek, maka harus mengikuti program DLP. Dokter umum tidak akan diakui.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah

(PP) yang membuat kondisi tenang, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat, yang menjadi bola liar. Ini menjadi problem bidang kedokteran kita," kritisi Dadang.

Dadang menegaskan, jika UU ini terus menjadi landasan, maka PP harus disiapkan. PP itu juga harus diterbitkan, sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Pasalnya, PP belum terbit, namun Surat Edaran Menteri sudah beredar.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga mengingatkan, jika DLP tetap



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

dijalankan, maka sarana dan prasarana kesehatan, khususnya Puskesmas, harus mendapat perhatian. Jangan sampai dokter DLP yang sudah menjalani pendidikan tambahan selama 6 semester, harus berakhir sia-sia.

"Jangan sampai DLP yang sudah menjalani 3 tahun pendidikan, ketika datang ke puskesmas, sarana dan prasarana serta alat-alat tidak ada. Itu sama saja bohong. Sebuah kebijakan tanpa dibarengi adanya kesiapan sarana dan prasarana, menjadi sebuah kebijakan yang tidak benar," kritisi Dadang.

Sebagaimana diketahui, Dokter Layanan Primer atau *Primary Care Physician*, yakni seorang dokter generalis yang mengutamakan penyediaan

pelayanan komprehensif bagi semua orang. Dokter ini melayani semua orang yang perlu layanan kesehatan tanpa batas usia, jenis penyakit, ras, dan tingkatan sosial.

DLP biasanya adalah dokter yang pertama dihubungi oleh pasien, karena faktor-faktor kemudahan komunikasi, lokasi yang dapat diakses, keakraban, biaya, persyaratan perawatan. Lalu, DLP bertindak atas nama pasien untuk berkolaborasi dengan spesialis rujukan, mengkoordinasikan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik rehabilitasi, bertindak sebagai pendata awal untuk catatan medik pasien, dan menyediakan manajemen jangka panjang pada pasien dengan kondisi yang kronis. ■

(sf) Foto: Kresna/hr

BURT DPR RI Sosialisasikan Renstra DPR RI ke Sumut

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Hasrul Azwar Harahap mengatakan bahwa DPR RI berkewajiban mensosialisasikan Rencana dan strategis (Renstra) DPR RI. Oleh karena itu ia berharap mendapat masukan dari Pemprov Sumatera Utara dan jajarannya, serta dari kalangan akademisi Sumatera utara.

“ Renstra DPR RI merupakan perencanaan jangka menengah DPR RI dalam menjalankan amanat tugas-tugas konstitusi. Renstra menjadi arahan bagi segenap unsur yang ada dilingkungan DPR RI dalam merumuskan program kerja tahunan dalam konteks pencapaian visi DPR RI lima tahun kedepan,” jelas Hasrul.

Dengan kata lain, lanjutnya, Renstra ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja DPR RI. Hal itu semata untuk mewujudkan visi lima tahun ke depan yakni menjadikan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang *modern*, berwibawa dan kredibel.

Atas dasar itulah menurut Politisi dari fraksi PPP, BURT berkewajiban untuk



Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar Harahap

menyebarkan kepada pemangku kepentingan mengenai rencana lima tahunan DPR RI termasuk agenda prioritas yang akan dicapai.

Selain itu juga untuk memperoleh aspirasi dari pemangku kepentingan sebagai

bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis periode lima tahun berikutnya.

Pada kesempatan itu, Arief dari Universitas Islam Negeri Medan (Unimed) mengapresiasi Renstra serta sosialisasi Renstra yang dilakukan BURT DPR RI. Hal itu akan menjadi sebuah tolak ukur yang obyektif atas DPR RI. Karena tak dapat dipungkiri selama ini DPR RI dan beberapa lembaga lainnya kerap di nilai negatif. Padahal banyak hal yang telah

dilakukan oleh DPR RI untuk bangsa ini.

"Dengan Renstra ini akan terukur kinerja DPR RI. Pencapaian apa saja yang sudah dilakukan, dan mana yang belum tercapai. Ini tentu akan menjadi sebuah tolak ukur yang obyektif," ujarnya. ■

(Ayu) Foto: Ayu/fk

Legislator Tekankan Kejaksanaan Harus Lebih Profesional

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap kejaksanaan dapat lebih profesional dalam menangani berbagai permasalahan penegakan hukum di Indonesia. "Saya menitipkan harapan kepada Kejaksanaan agar lebih profesional agar dipercaya oleh publik," ujar Nasir dalam Rapat Kerja Komisi III bersama dengan Kejaksanaan RI, Selasa (6/12) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Beberapa kasus yang menjadi sorotan kepada Korps Adhyaksa ini di antaranya adalah mengenai kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Kasus yang diduga dilakukan Ahok itu menjadi perhatian di masyarakat luas. Oleh karena itu, penanganan yang lebih serius tentu menjadi syarat mutlak dalam penanganannya.

"Kejaksanaan harus menunjukkan keseriusan dalam kemampuannya untuk mengurai kasus penistaan agama, agar kasus penistaan agama tersebut benar-benar ditangani dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas," ungkap Legislator PKS dari Aceh ini.

Selain soal kasus penistaan agama, dalam kesempatan tersebut Nasir Djamil juga menyoroti kinerja Kejaksanaan di daerah. Penegakan hukum di daerah saat ini mengalami persoalan yang serius, dimana, menurut Nasir, masyarakat sangat ketakutan ketika menghadapi persoalan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul di daerah adalah mengenai adanya oknum yang memainkan kasus, sehingga tidak jarang kasus perdata kemudian berubah menjadi kasus pidana.

"Masyarakat di daerah cukup takut ketika menghadapi permasalahan, tidak sedikit masalah perdata kemudian menjadi masalah pidana," jelas Nasir.

Menanggapi itu, Jaksa Agung Prasetyo menyambut baik masukan dari Nasir Djamil. Jaksa Agung Prasetyo meminta kepada Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) agar melakukan pengawasan yang lebih intensif sehingga permasalahan perkara di daerah tidak terjadi.

"Saya meminta kepada Jampidum

dan Jampidsus agar melakukan pengawasan yang lebih intens pada Kejaksanaan di daerah," papar Jaksa Agung Prasetyo.

Mendapat respon positif dari Jaksa Agung Prasetyo ini, Nasir Djamil berharap bahwa apa yang disampaikan bisa ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan. Selain itu Nasir juga



Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

berharap agar masukannya itu dapat menjadi stimulus yang tepat bagi Kejaksanaan agar mampu menjadi institusi penegak hukum yang lebih baik dan mampu dan dapat mewujudkan keadilan di masyarakat luas.

"Saya berharap agar masukan-masukan untuk Kejaksanaan tersebut dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan dan bisa menjadi stimulus dalam upaya reformasi birokrasi di Kejaksanaan," papar Nasir.

Saat ini, Kejaksanaan Agung memang menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Selain karena banyaknya jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi di beberapa daerah, upaya penuntutan yang menjadi tugasnya dalam kasus penistaan agama juga menjadi alasan Kejaksanaan menjadi perhatian publik saat ini.

"Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan sebagai wakil rakyat kepada Kejaksanaan RI adalah langkah yang tepat dalam upaya menyampaikan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu," tutup Nasir Djamil. ■

(*mp), Foto: Arief/br

Komisi V DPR RI Bahas Persiapan Sarpras Jelang Natal dan Tahun Baru

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakorlantas, membahas persiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur hari raya Natal dan Tahun Baru.

“Komisi V DPR RI ingin memperoleh informasi yang lebih komprehensif, sekaligus membahas bersama-sama mengenai kesiapan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka hari libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017,” ucap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (08/12).

Norma Dasar Pemilu Tidak Perlu Diubah

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Totok Daryanto menegaskan jika ingin memperbaiki kualitas demokrasi bangsa kita maka sendi-sendi demokrasi yakni peraturan perundang-undangan mesti dibuat permanen.

“Jangan demokrasi kita obok-obok sendiri, peraturan kita ubah-ubah lagi, kita sudah belajar demokrasi cukup lama, sendi-sendi sudah kita tetapkan,” tegas Totok (F-PAN) saat Rapat Dengar Pendapat

Menurutnya, pembahasan UU Paket Politik yang tiap kali muncul menjelang pemilu menyebabkan adanya in-efisiensi nasional. Lebih lanjut, ia mengusulkan agar substansi RUU Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas menetapkan suatu sistem apakah terbuka atau tertutup sehingga bisa digunakan minimal 5 kali masa pemilu.

"Undang-Undang politik yang selalu berubah-ubah itu, sebetulnya itulah pangkal mulanya politik kita tidak stabil dan bangsa ini menjadi tidak produktif juga," ungkap Totok.

"Kita mestinya tidak harus mengerjakan hal-hal yang mestinya sudah selesai dalam urusan ketatanegaraan kita. Ini masih terpikir mau terbuka atau tertutup,

milih partai atau anggota. Seharusnya ini sudah selesai, kita sudah menyelenggarakan pemilu berkali-kali. Untuk itu, kami menginginkan norma-norma dasar pada pemilu sebelumnya tidak perlu diubah," kritisnya.

Selain itu, Totok menambahkan, jikapun ada perubahan sebaiknya tidak harus perubahan yang secara drastis karena membangun demokrasi sama halnya dengan membangun sebuah tradisi. Dengan begitu, bangsa kita bisa dewasa dalam berdemokrasi.

"Menurut saya ini tidak mendidik, tidak menjadikan kita dewasa. Kita usulkan norma-norma dan sendi-sendinya tidak berubah setiap kita mau pemilu, minimal 5 kali sehingga kita bisa mantap melaksanakan demokrasi. Jadi apakah sistemnya tertutup atau terbuka, menurut saya terbuka sudah kita laksanakan, ya itu yang terbaik. Yang menjadi tidak baik, itu yang kita sempurnakan, mungkin dari pengawasannya," tambah politisi dari dapil Jawa Timur V. ■



Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Totok Daryanto

(RDP) Pansus dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/08) sore.

Fary mengatakan, meningkatnya kebutuhan transportasi darat, laut dan udara pada setiap libur panjang akhir tahun, memerlukan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam semua sektor pelayanan transportasi. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan penanganan sangat khusus dan serius dari pemerintah dan semua pihak yang terkait disektor transportasi.

"Kita berharap semua permasalahan di sektor transportasi yang sangat merugikan masyarakat dapat diantisipasi. Seperti kita ketahui, pada libur Natal dan Tahun Baru tahun 2015 lalu, yang semula kita perkirakan akan berjalan dengan normal, malah

terjadi kemacetan yang luar biasa," ujarnya.

Oleh karena itu Komisi V DPR RI ingin memperoleh informasi dari pemerintah, mengenai kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Agar permasalahan transportasi yang mengakibatkan kemacetan di tahun lalu, tidak terulang kembali. ■

(dep.mp), Foto: Azka/br



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis

(amr.mp) foto: jakarta

Revisi UU Budidaya Tanaman

Komisi IV DPR RI Jaring Pendapat ke Unibraw Malang

Komisi IV DPR RI memandang Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman perlu direvisi. Hal ini karena penerapannya banyak menimbulkan masalah dan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI menggelar konsultasi Publik dan Jaring Pendapat dengan Universitas Brawijaya dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapat masukan atas revisi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, pada awalnya, Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman diharapkan dapat menjadi payung hukum terkait penyelenggaraan sistem budidaya tanaman yang dapat berpihak kepada petani, khususnya petani kecil.

Namun dalam penerapannya, UU tersebut menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya terkait dengan pembukaan dan pengelolaan lahan, perbenihan, perlindungan tanaman, panen dan pasca panen.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman beberapa substansi perlu diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi pertanian. "Komisi

IV DPR RI menilai perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman," papar Viva Yoga kepada Parlemen, di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Kota Malang Jawa Timur, Jumat (9/12)

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, yang sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pertanian dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu,

pembangunan pertanian menjadi bagian dari Pembangunan



Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga

Nasional yang diharapkan dapat menuju kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Sebagai negara berbasis kepulauan (archipelago state), upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi pertanian memerlukan dukungan SDA, dan sumber daya manusia (SDM) dengan kondisi agroklimat yang sesuai karakteristik daerah.

"Upaya tersebut dilakukan dalam suatu sistem budidaya tanaman yang terpadu dengan memanfaatkan dan mengelola SDA nabati melalui bantuan manusia, modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya guna menghasilkan produk pertanian sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diharapkan," tegas Viva.

Lebih lanjut, Viva menambahkan, bahwa dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU, Komisi IV selalu berlandaskan pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga pada acara FGD ini, pihaknya berharap mendapatkan masukan terhadap RUU Sistem Budidaya Tanaman secara komprehensif. ■

(as), Foto: Anandi/br

Ada Ketidakpastian Bila Yuan Jadi Alat Tukar Utama

Wacana pemerintah yang ingin menjadikan yuan sebagai alat tukar utama, punya risiko bagi perekonomian Indonesia. Selain akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi di Indonesia, wacana ini juga hanya sebagai pancingan pemerintah agar negara-negara barat dan Amerika meningkatkan investasinya di Tanah Air.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat dihubungi Parlemen, Jumat (9/12). "Apabila Indonesia menggunakan yuan sebagai alat tukar utama, tentu akan punya risiko. Sampai sejauh ini perekonomian Cina belum stabil, masih volatil, dan hal ini akan memberikan risiko ketidakpastian bagi pelaku ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Politisi PAN ini juga mensinyalir, wacana menjadikan yuan sebagai alat tukar utama dipandang sebagai penghangat saja. Pemerintah sedang mengejar realisasi investasi pada 2017. Untuk itu, diharapkan dengan wacana ini investasi negara-negara barat, Amerika, termasuk Jepang mengalir ke Indonesia. Nemaun, dari sisi ekonomi, menjadikan yuan sebagai alat tukar utama tidaklah tepat, karena ekonomi Cina sedang

menghadapi laju pertumbuhan yang menurun.

"US Dollar telah menjadi alat tukar utama dunia. Dunia menggunakan US dollar disebabkan ekonomi Amerika yang relatif stabil. Dulu sempat ada wacana untuk menjadikan euro menjadi alat tukar utama. Tetapi sangat riskan menggunakan euro, karena selain mata uang baru, euro juga relatif *fragile*, karena rentan terhadap

perpecahan," papar politisi dari dapil Sumsel I itu.

Ditambahkan Hafisz, argumen pemerintah juga tidak dapat diterima di balik keinginan menjadikan yuan sebagai alat tukar utama. Pemerintah menilai ekspor ke negeri tirai bambu cukup tinggi, mencapai 10-11 persen dari total ekspor Indonesia. Cina juga dinilai sebagai mitra dagang yang baik. Jadi menurut pemerintah, tepat bila yuan dijadikan alat tukar utama.

"Hubungan dagang kita dengan Cina tidak menguntungkan alias berat sebelah.

Sudah sejak empat tahun terakhir merugi dalam neraca perdagangan dengan Cina. Sementara dengan Amerika kita selalu surplus alias untung. Pilih mana, perdagangan besar tapi rugi atau perdagangan kecil tapi untung. Dan yang paling penting adalah dollar cukup diterima di semua pasar. Sementara yuan baru sebagian dunia saja," kritik Hafisz. ■



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tobir

Ada Kesalahpahaman Masyarakat Terhadap Pengertian Konservasi

Pemahaman masyarakat terhadap konservasi perlu diatur dan dijelaskan dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE). Masyarakat pada umumnya, hanya mengetahui konservasi ada di hutan atau cagar alam, padahal saling terintegrasi seluruh alam.

“Nantinya semua harus dikonservasi secara terintegrasi, baik itu tanah, air, laut, bahkan udara karena saling berkaitan. Jadi ini bukan dalam rangka membatasi masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada di alam. Tetapi ini demi menjaga sumber daya alam kita yang makin rusak,” kata anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R. Abdullah saat mengikuti FGD dengan pakar di UGM, Yogyakarta (8/12).

Misalnya, jelas Taufiq, ada petani kentang yang memanfaatkan lahan pertanian, memang dari sisi pendapatan mereka tercapai, akan tetapi dari sisi konservasi alam menjadi suatu pertanyaan besar, karena saat menanam menggunakan pupuk yang dapat merusak tanah, sedangkan di dalam tanah itu ada banyak sekian ekosistem, ini yang harus diatur agar saling terintegrasi.

"Jadi harapan saya, dalam RUU KKHE ini, setiap pemanfaatan lahan harus memperhatikan dua hal, yaitu bagaimana masyarakat meningkat secara ekonomi akan tetapi konservasinya tercapai" kata Politisi F-PKB itu.

Selain itu, lanjut Taufiq,

pentingnya pembahasan RUU KKHE ini bisa ditinjau dari aspek sejarah. Ternyata, spesies yang ada di dunia ini kalau dari sejak awal dunia ini ada, tinggal 1%. Artinya 99% itu punah dengan berbagai peristiwa, salah satu faktornya akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap pelestarian alam.

"Oleh karenanya, UU ini menjadi sangat penting, apalagi menyangkut kelangsungan hidup seluruh isi alam raya dan ekosistem, kita berharap pada spesies yang tinggal 1% ini," ungkapnya.

Sedangkan, menurut Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro, selama ini pengawasan terhadap konservasi ini kurang. "Saya mengusulkan agar konservasi bisa dikelola oleh BUMN atau BUMD. Sewaktu menjadi dirjen, saya pernah mencoba terhadap perusahaan swasta di suatu daerah untuk menjaga satwa liar seperti Harimau, Rusa, Panda dan Kerbau. Ternyata berjalan efektif, satupun tidak ada masyarakat yang berani membunuh, karena dijaga oleh perusahaan, disitulah pemikiran saya, tapi nanti tugas BUMD ini hanya untuk mengkonservasi dan merehabilitasi, bukan merusak" kata Politisi

Gerindra itu.

Ia menambahkan, RUU KKHE yang ada saat ini juga belum mengatur insentif masyarakat, karena banyak kelompok masyarakat maupun lembaga yang melakukan konservasi atas dasar kemanusiaan tetapi negara belum hadir. Setidaknya bisa diberikan insentif fisik maupun non fisik, dalam UU nantinya perlu diusulkan. ■



Anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R. Abdullah

Sekjen Senat Kerajaan Kamboja Puji Sistem Kerja Setjen DPR RI

Sekjen Senat Kerajaan Kamboja memuji Sistem Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI saat acara jamuan makan malam Plt Sekjen DPR RI Achmad Djuned yang didampingi Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Radjaguguk bersama Delegasi Setjen Senat Kerajaan Kamboja di Jakarta (8/12).

Dalam sambutan yang dibacakan **D**eputi Persidangan Damayanti, jajaran Setjen DPR RI mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dalam rangka *Study Visit* untuk mempelajari dan bertukar pandangan maupun pengalaman mengenai fungsi-fungsi parlemen dan pelaksanaan prinsip-prinsip pengaturan forum konsultasi publik di Indonesia.

"Tadi siang, Delegasi telah melakukan diskusi tentang fungsi representasi, komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan serta penyerapan aspirasi masyarakat di DPR RI. Delegasi juga telah meninjau TV Parlemen dan Media Center," ungkap Maya, sapaan akrab Damayanti.

Lebih lanjut Maya mengharapkan kunjungan antar parlemen di tingkat Sekretariat ini dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara dan meningkatkan saling kesepahaman tentang sistem politik masing-masing, serta pelayanan terbaik oleh Sekretariat Jenderal selaku *supporting system* agar Parlemen dapat bekerja maksimal sesuai peraturan yang berlaku.

Hubungan antar parlemen di kawasan Asia Tenggara mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak transformasi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Selain itu, keanggotaan dalam *Association of Secretary General of Parliaments* (ASGP) juga sangat membantu dalam berbagi pengalaman tentang praktek-praktek politik dan sistem keparlemenan.

Namun demikian, kunjungan bilateral terbukti lebih meningkatkan saling



Plt Sekjen DPR RI Achmad Djuned bersama Delegasi Setjen Senat Kerajaan Kamboja

kesepahaman secara dewasa dan kualitas hubungan bilateral antar negara juga semakin erat. *Study Visit* seperti ini dapat memperluas wawasan, menawarkan sudut pandang yang lebih beragam, membentuk opini yang lebih obyektif, dan memperkuat jaringan kerja keparlemenan. Pertemuan *face to face* juga meningkatkan saling kepercayaan dan memperkuat jaringan kerja ketika kedua negara harus melakukan kerja sama di forum internasional.

"Kami mengharapkan di masa yang akan datang agar *Study Visit* seperti ini dapat dilakukan secara *reguler* dan *reciprocal* agar kedua belah pihak dapat terus saling meng-*update* informasi dan memperkuat jaringan guna mempermudah dalam mencari solusi ketika dihadapkan pada permasalahan yang menjadi kepentingan bersama," pungkask Maya.

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Setjen Senat Kerajaan Kamboja Mr. Ing Chenda mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan terkait fungsi-fungsi parlemen antara lain fungsi pengawasan, anggaran (budgeting), legislasi

(membuat undang-undang). Pihaknya akan mencoba menerapkan tiga fungsi parlemen di Kamboja untuk meningkatkan kualitas Parlemennya.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputy Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Jaka Dwi Winarko, Kepala Biro Protokol Suratna, Kepala Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Rahayu Setyowardhani, Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Juliasih, Kepala Biro Kepegawaian dan Administrasi Nunu Nugraha Kuswara. ■

(giti), Foto: Nanjuroji/hr

PMN untuk PT SMI Perkuat Permodalan

Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2017 bagi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan. Dengan alokasi PMN ini, diharapkan kehadiran PT. SMI betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan negara.

Kewajiban Perusahaan Kelola Kawasan Konservasi Diusulkan Minimal 30%

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengusulkan, agar kewajiban perusahaan mengelola kawasan hutan pemanfaatan, baik hutan produksi maupun hutan tanaman industri dinaikkan minimal 30% untuk mengelola kawasan konservasi.

“ UU Konservasi yang ada saat ini hanya mengatur 10% kewajiban perusahaan sebagai *buffer zone* dalam sebuah kawasan hutan. Menurut saya tidak cukup untuk menjaga *mega biodiversity*. Bayangkan kalau perusahaan mengelola 300 ribu hektar, kalau kewajiban 10%, berarti hanya 30 ribu hektar. Tetapi 27 hektar itu nantinya dibuat monokultur oleh perusahaan, tentu ini tidak *fair*,” kata Herman saat memimpin Tim Komisi IV DPR RI, FGD dengan para pakar di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (8/12).

Poin lainnya terhadap masukan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE) yaitu, masukan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) di sebuah area pertanian yang tidak bisa *protected area* karena tidak bisa dipisah dengan zona inti, masih ada

permasalahan manajemen konservasi pertanian.

"Saya berharap manajemen pertanian konservasi bisa dipayungi oleh UU ini. Sehingga konsep *protected area* dapat melindungi terhadap segenap sumber daya alam hayati dan ekosistem," katanya.

Menurut Herman, paradigma berpikir untuk RUU KKHE ini harus mengakomodir dan

mengintegrasikan seluruh kawasan. Karena sebuah ekosistem tidak dapat dipisahkan antara gunung, lautan, daratan perairan dan pertanian.

"Kami ingin mengintegrasikan, terhadap seluruh kepentingan konservasi, sebuah peraturan untuk memastikan terhadap sumber daya alam kita bisa dinikmati anak cucu di masa yang akan datang," ujar Politisi F-Demokrat ini.

Selain itu, dengan adanya ratifikasi konvensi internasional Protokol Kyoto dan Cartagena, serta *komitment UN Framework on Climate Change* (UNFCCC) yang telah dituangkan kedalam *The main objective of the annual Conference of Parties* (COP) 21 di Paris.

Ditambahkan Herman, telah bersepakat bagaimana menurunkan gas karbon dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim secara internasional. Dengan adanya revisi UU KKHE ini harus menyesuaikan dengan perjanjian tersebut. ■



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Supriyatno

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Supriyatno saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Direksi PT. SMI

(BUMN di bawah Kemenkeu), Rabu (7/12). Tahun anggaran 2017, PT. SMI mendapat PMN sebesar Rp2 triliun. "Ini untuk memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kapasitas pembiayaan," ungkap Supriyatno.

Komisi XI, kata Anggota F-Gerindra ini, berharap agar PT. SMI mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai katalis dalam memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rapat ini dihadiri Dirut PT. SMI Emma Sri Martini. Dalam paparannya, Emma menjelaskan, BUMN yang dipimpinnya khusus membiayai proyek infrastruktur, seperti jalan raya, transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan lain-lain.

Ditambahkan Emma, banyak manfaat sosial ekonomi dari proyek yang dibiayai PT. SMI. Misalnya, ia menyebutkan, di

sektor ketenagalistrikan yang dibiayai PT. SMI, sudah terpasang pembangkit berkapasitas 1.504 MW. Ini bisa menerangi 1,7 juta rumah atau 6,7 juta jiwa. Sementara untuk pembiayaan pengadaan air bersih, PT. SMI sudah berkontribusi memproduksi air bersih berkapasitas 10.140 liter/detik. Kapasitas tersebut mampu memberi air bersih untuk 1,5 juta rumah atau 5,8 juta jiwa.

Sementara itu, Supriyatno kembali menambahkan, agar pembiayaan infrastruktur nasional ini bisa dibahas lebih detail dalam *focus group discussion* (FGD). Apalagi, hampir setiap tahun PT. SMI mendapatkan PMN. "Penting dibicarakan, PT. SMI arahnya mau ke mana. Bicara 10 tahun yang akan datang, apa yang mau dilakukan," ucapnya di hadapan rapat. ■

(ik.mp), Foto: Jaka/br

(mb), Foto: Azka/br

Waspada! Masuknya Bibit Cabai Ilegal dari China

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan, adanya bibit cabai ilegal yang ditanam di wilayah Indonesia oleh Warga Negara China karena mengandung bakteri yang berbahaya, sangat meresahkan.

“ Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini, bibit cabai ilegal yang diungkap Badan Karantina merupakan salah satu bioterorisme, dengan melakukan upaya-upaya untuk mengganggu keamanan melalui jasa trafik atau melalui makhluk hidup.

"Saya yakin ini adalah merupakan bagian dari bioterorisme yang harus dihadapi, karena ini penyakit lolos didatangkan dari luar negeri dan sangat berbahaya," katanya kepada Parlementaria, usai memimpin Tim Komisi IV melakukan konsultasi publik dan jaring pendapat dengan Unibraw Malang, Jumat (9/12)

Kepada Pemerintah dan aparat hukum, politisi PAN ini mendesak untuk mengusut secara mendalam kasus ini. "Kami minta agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian melakukan pengusutan secara tuntas. Kalau ini dibiarkan sangat berbahaya, dan mengganggu plasma nuftah kekayaan Indonesia yang akan menyebabkan penyakit baru. Bila sudah menyebar ada indikasi endemik dan pandemik yang kemudian ini bisa mengganggu kehidupan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, lanjut Viva, kasus ini juga merupakan dampak dari lemahnya sistem karantina nasional.

apalagi sudah ada karantina di dua kementerian yaitu Karantina tanaman dan hewan di bawah kementerian pertanian, dan Karantina ikan dibawah kementerian kelautan dan perikanan.

Atas kasus ini, seluruh fraksi di Komisi IV sepakat menggabungkan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi

tugas karantina dua kementerian ini dalam satu Badan Karantina Nasional yang langsung bertanggung jawab pada presiden. "Jadi ini tidak membentuk badan baru, tetapi menggabungkan badan yang sudah ada karena badan yang sudah ada itu tidak efektif. Seluruh badan sudah ada Sumber daya Manusia (SDM) tinggal dijadikan satu, tinggal

dirapikan untuk membentuk Badan Karantina Nasional sehingga terukur sistem, kerja, capaian, dan metodenya," ungkapnya.

Sekarang ini, sifatnya parsial dari beberapa kementerian, jika ada bahan bibit penyakit renik atau makhluk hidup, seperti bibit cabe ilegal yang berbakteri itu sangat mungkin, karena dari sisi karantinanya lemah.

"Kami minta kepada Pemerintah untuk serius mengkaji soal badan karantina yang bersifat nasional ini. Sebenarnya penggabungan ini dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam melakukan efisiensi dan efektivitas badan," imbuhnya

Patut diketahui, sebanyak 5.000 batang cabai ilegal disita Badan Karantina Pertanian di perbukitan

kawasan Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, baru-baru ini. Cabai yang disita ini berasal dari benih yang dibawa empat warga negara China. Cabai ini diketahui mengandung bakteri *Erwinia chrysanthemi* yang diyakini membahayakan produksi nasional cabai di Indonesia. ■

(su) foto:arif/br

Setjen DPR RI Gelar Sosialisasi Pelaksanaan PP 53/2010

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan sosialisasi mengenai tantangan-tantangan dalam pelaksanaan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan solusinya serta Pengenalan Aplikasi E-Disiplin dilingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

“ Sosialisasi ini diadakan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 UU No. 43 Tahun 1969 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dari situ terbit PP 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujar Kepala Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta

Nugraha di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (06/12).

Ia juga menyampaikan, Setjen DPR RI merasa perlu untuk melakukan sosialisasi kembali peraturan PP 53

tentang Disiplin PNS dilingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Pada sosialisasi itu juga diperkenalkan mengenai aplikasi E-Disiplin yang bisa diakses oleh pegawai diportal DPR RI.

"Dalam portal tersebut sudah disediakan aplikasi E-Disiplin, kita berharap para pegawai dapat mengikutinya," ucapnya.

Setyanta Nugraha menjelaskan, yang dimaksud dengan disiplin PNS menurut PP 53 adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

"Melihat semakin meningkatnya kesejahteraan di lingkungan Setjen DPR RI saat

ini, maka harus diiringi pula dengan peningkatan disiplin dalam bekerja. Akan tetapi dengan adanya kenaikan tunjangan kerja itu, dalam kenyataannya masih



Kepala Irtama DPR RI Setyanta Nugraha

tidak berbanding lurus dengan perbaikan disiplin dan kinerja pegawai. Hal itu terbukti dengan meningkatnya jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin," tegasnya.

Berbagai upaya untuk menyikapinya telah dilakukan untuk meningkatkan integritas kinerja dan kedisiplinan PNS, namun terasa masih kurang dan perlu dilakukan sosialisasi.

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan akan memperoleh pemahaman yang sama bagi para atasan langsung, yakni pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP tersebut merupakan jawaban untuk menghilangkan citra negatif PNS yang dianggap malas dan tidak disiplin," pungkasnya. ■

(dep.mf), Foto: Jojati/br

Sebagai Penuntut Umum Tertinggi Kejagung Dperingatkan Menguasai Kasus

Kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan kasus sensitif yang telah menyedot perhatian masyarakat banyak. Kalau tidak ditangani secara cermat dan adil oleh Jaksa Agung, bisa memperburuk citra Kejagung. Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil memperingatkan kepada lembaga Adhyaksa ini agar menguasai permasalahan secara menyeluruh.

Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi, dengan begitu, Nasir menganjurkan dengan sangat agar Kejagung profesional serta tidak gagap dalam menangani kasus. Hal tersebut disampaikan di sela-sela Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (06/12).

"Kita minta kepada beliau (HM Prasetyo) agar jaksa-jaksa yang tergabung dalam penuntut hukum benar-benar menguasai masalah yang mereka tangani. Jangan sampai ketika dalam persidangan mereka terlihat tidak menguasai kasus tersebut, apalagi jika nanti disiarkan langsung oleh televisi. Hal itu akan merugikan jaksa itu sendiri karena dapat menurunkan kredibilitas para jaksa seolah-olah penanganan kasus Ahok

ini tidak ditangani secara serius," ujar Nasir Djamil.

Politisi F-PKS itu juga menyampaikan agar masyarakat dapat mempercayakan kepada institusi penegak hukum dan tidak terlalu mendramatisir kasus tersebut. "Menurut saya jangan terlalu didramatisir, justru kami meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan kasus tersebut kepada institusi penegak hukum," ungkap Nasir Djamil.

Selain itu ia juga berharap Jaksa Agung tidak mendapat tekanan dari pihak luar sehingga kasus dapat diselesaikan dengan cermat dan teliti, mengingat kasus tersebut menyangkut banyak kepentingan masyarakat.

"Harapan kami jangan sampai kemudian ada kecurigaan -

kecurigaan atau tekanan dari pihak luar karena memang sejak awal kasus ini menimbulkan pro-kontra. Harus cermat dan teliti karena menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan," tambahnya. ■



Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil

(eur-eko), Foto: Anadi/br

Sekretariat Senat Kerajaan Kamboja Kunjungi TV Parlemen dan *Pressroom* DPR RI

Dalam rangkaian kunjungannya ke DPR RI, Sekretariat Senat Kerajaan Kamboja berkesempatan mengunjungi TV Parlemen dan *Pressroom* DPR RI sebagai salah satu *supporting system* yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Saat mendampingi delegasi, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko, menjelaskan *Supporting system* yang ada di DPR RI dibentuk untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat melalui *media relation* baik internal maupun eksternal yang ada di Gedung DPR RI. Adapun *media relation* sebagai *supporting system* yang dimiliki DPR RI salah satunya TV Parlemen.

"Tujuan kunjungan mereka (Sekretariat Senat Kamboja) ke Gedung DPR RI untuk mengetahui bagaimana fungsi *supporting system* dari sekjen DPR RI dalam membantu dan melaksanakan fungsi representasi.

Tadi kita ajak mereka melihat lebih dekat bagaimana *media relation* menjalin hubungan antara lembaga dengan publik melalui media," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12)

"Kita sudah ajak ke *pressroom* dan saat ini berada di studio TV Parlemen untuk kita jelaskan bagaimana upaya-upaya kita dari sekjen melalui berbagai sarana prasarana untuk memudahkan *channeling* antara DPR RI dan masyarakat, salah satunya yang paling penting melalui media," lanjutnya

Selain itu, lanjut Djaka, dalam pertemuan, Sekretariat Senat Kerajaan

Kamboja menyampaikan mengenai *supporting system* yang mereka gunakan dan menarik untuk diterapkan di Indonesia, yaitu dibentuknya rumah aspirasi di delapan daerah pemilihan yang ada di Kamboja.

"Kita tadi bertukar pengalaman dan pandangan mengenai *supporting system*

kalau memungkinkan akan melakukan tukar-menukar *staff* untuk melihat praktek di masing-masing negara (Indonesia-Kamboja)," ungkapnya.

Ditempat yang sama Ing Chenda selaku *Director of General Department for Legal Service and Collective Memory* Senat Kerajaan Kamboja menyampaikan terimakasih atas penerimaan Setjen DPR RI, pihaknya sangat antusias bisa mengunjungi TV Parlemen

"Ini merupakan rangkaian acara kunjungan Sekretariat Senat Kerajaan Kamboja ke DPR RI. Kami sangat bahagia mempunyai pengalaman di

TV Parlemen. Kami punya rencana membuat *media relation* juga namun terbentur dengan anggaran yang kurang memadai, saat ini kami hanya bergantung kepada TV Nasional saja," katanya.

Lebih lanjut, Ing Chenda menyampaikan hasil kunjungan ke Parlemen Indonesia ini akan dilaporkan kepada pimpinan untuk dibentuknya *media relation* seperti TV Parlemen di masa mendatang. "Kami akan laporkan hasil kunjungan ini, mudah-mudahan pimpinan kami akan memutuskan membuat *media relation* seperti TV Parlemen," pungkasnya. ■



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko bersama Sekretariat Senat Kerajaan Kamboja

yang telah dilakukan di negara masing-masing (Kamboja dan Indonesia). ini sangat bermanfaat karena ada beberapa hal kesamaan dan perbedaan dalam memberikan *supporting system* sehingga bisa saling berbagi pengalaman. Mereka menjelaskan bagaimana mengelola rumah aspirasi tersebut, bagaimana mekanisme dari pengaduan masyarakat hingga disampaikan di dalam sidang-sidang, itu yang kita diskusikan," ujarnya.

Di Kamboja, lanjut Djaka juga ada yang namanya institut parlemen dimana salah satu fungsinya untuk meningkatkan kapasitas *building* kelembangaan, meningkatkan kualitas dari SDM nya. "Beliau menyampaikan



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisjam usai melakukan pertemuan dengan Asisten III Setda Provinsi Jawa Timur

Komisi X Lakukan Pengawasan Implementasi UU No 43 Tahun 2007

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada Jumat, (09/12) guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Tim Kunspek Komisi X yang dipimpin oleh Ridwan Hisjam ini ingin memastikan agar perpustakaan yang ada di daerah sejalan dengan UU Perpustakaan yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tim kunspek diterima oleh Asisten Setda Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ridwan Hisjam mengatakan, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Sehingga perpustakaan penting untuk dikelola secara serius. "Salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa," ujar Ridwan Hisjam di Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bukti empiris saat ini menunjukkan bahwa laporan UNESCO pada tahun 2011, indeks membaca orang Indonesia pada posisi 0.0001 yang berarti dari 1.000 penduduk hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca. Kemudian, pada penelitian UNESCO tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada posisi 110 dari 187 negara. kajian Perpustakaan Nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 25.1. Laporan Central Connecticut University tahun 2016 juga menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara dalam literasi internasional.

Namun, sejak lahirnya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang telah disahkan dan diundangkan pada 1 November 2007 seharusnya mampu mendorong peningkatan budaya literasi di Indonesia. Namun, implementasi UU Perpustakaan masih belum menggembirakan, padahal sudah sembilan tahun UU tersebut disahkan.

Atas dasar itulah, Komisi X melakukan peninjauan secara langsung guna melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap UU Perpustakaan. Serta mendapatkan data empiris sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan dan ketentuan terkait regulasi perpustakaan berupa data tentang koleksi perpustakaan, naskah kuno, jumlah perpustakaan dan jenis perpustakaan, pustakawan dan pemustaka.

Selain Ridwan Hisjam (F-Golkar), kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Popong Otje Djunjunan (F-Golkar), Dadang Rusdiana (F-Hanura), Latifah Shohib (F-PKB), Arzetti Bilbina (F-PKB), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Mustafa Kamal (F- PKS) dan Muslim (F-Demokrat), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra) dan Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem). ■

(foto : Jeyadil/br)

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Anggota DPR RI Ridwan Hisjam mengunjungi Perpustakaan Sidoarjo, Jum'at (9/12)
Foto: Hendra/hr

Tim Kunspek Komisi III DPR RI dipimpin Anggota DPR RI Arsul Sani mengunjungi Mapolda di Jateng, Jum'at (9/12).
Foto: Sofyan/hr



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron melakukan pertemuan dengan para pakar UGM terkait RUU KKHE di Yogyakarta, Kamis (8/12). Foto: Jaka/hr